

NEGARA KEBANGSAAN DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI

Emrus Sihombing

Universitas Pelita Harapan

Emrus_sihombing@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk negara, termasuk Negara Kebangsaan merupakan konstruksi sosial sebagai produk proses komunikasi antar warga dalam suatu teritorial negara atau yang akan membentuk negara. Pada proses komunikasi tersebut terjadi negosiasi (pertukaran) menuju kesepakatan sosial dalam memandang bentuk kebersamaan yang dibangun dalam suatu negara. Dengan demikian, Negara Kebangsaan sebagai realitas sosial yang sangat cair, dapat berubah bahkan berganti menjadi antara lain bentuk negara ke-agama-an. Lihat saja indikasi perubahan tersebut dari upaya beberapa aktor politik di Indonesia melakukan sosialisasi politik dalam rangka terbentuknya Negara Islam Indonesia (NII). Konstruksi maupun usaha penggantian bentuk negara pasti terjadi pada suatu dinamika sosial yang sangat complicated. Tidak hanya karena keinginan sekelompok kecil aktor sosial semata, tetapi adanya peluang terjadinya proses komunikasi politik menciptakan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan dinamika internasional yang kondusif mendorong tawaran ideologi yang melahirkan bentuk negara tertentu yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan warga negara dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan sosial kenegaraan daripada tanpa atau bentuk negara sebelumnya. Dengan demikian, adanya realitas NII di Indonesia sebagai produk proses komunikasi politik yang pernah dan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan kata lain, NII merupakan produk sosial politik bersama, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, proses konstruksi Negara Kebangsaan tidak hanya berlangsung pada saat awal perumusan bentuk negara saja, tetapi terus menerus sejak keinginan pembentukan negara hingga tanpa akhir.

Kata kunci: negara kebangsaan

PENDAHULUAN

Negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Karena itu, para pendiri bangsa ini merumuskan bahwa Indonesia menganut sistem negara kebangsaan. Bukan negara keagamaan, atau bentuk lainnya. Indonesia sebagai negara kebangsaan tetap mengalami proses politik. Perjalanan proses politik di Indonesia masih fluktuatif. Kadang sesat stabil, kadang juga bergejolak. Mulai dari masa para kemerdekaan hingga kinitindakan radikal masih terjadi. Belum ada tanda-tanda akhir dari tindakan yang dapat menewaskan rakyat tak berdosa itu. Kadang pemerintah seakan gamang bertindak tegas dan belum berani memberikan garansi keamanan bagi setiap warga dari aksi teroris. Kini rasa keamanan terus terusik. Keselamatan masyarakat berada pada situasi tidak pasti. Ancaman bom membayangi kehidupan keseharian kita. Apalagi lokasi penyebaran bom dilakukan dengan acak. Bahkan ada yang diduga bom ditanam berdekatan dengan jalan raya yang juga dilalui Presiden. Sebagai tindakan teror, tak seorang pun tahu pasti kapan dan dimana bom meledak.

Aksi radikal dimotori teroris sudah berlangsung cukup lama di negara ini. Cepat atau lambat, tindakan tersebut dapat menjadi ancaman serius terhadap rasa kebangsaan kita. Dampaknya, mengganggu semua kehidupan sosial, seperti politik, ekonomi, budaya, keamanan dan kunjungan wisata. Energi bangsa terkuras menanggulangi aktivitas radikalisme. Program peningkatan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Akibat lanjut, dapat meruntuhkan NKRI, dan boleh jadi memunculkan ideologi baru seperti NII. Perilaku teroris tidak hanya merusak sarana publik, tetapi lebih jauh menelan korban manusia. Sekejap seseorang bisa menjadi korban luka parah dan meninggal pada hitungan detik. Hak azasi hidup seseorang tercabut seketika dengan mudah oleh ulah segelintir orang tak bertanggungjawab itu. Gerakan radikal ini tentu mempunyai agenda politik jangka panjang yaitu mengubah Indonesia dari negara kebangsaan menjadi bentuk lain. Bisa jadi membentuk NII.

Kenyataan menunjukkan, sekalipun kerja keras Polri menghentikan aksi teroris telah dan sedang dilakukan, namun penyebaran dan ledakan bom masih tetap berlangsung. Melihat eskalasi penyebarannya, sasaran bom sudah tidak segmented. Tempat keramaian menjadi inceran utama. Bahkan, teroris merambah sasaran lebih luas. Lihat saja rumah ibadah - Mesjid dan Gereja -

misalnya, yang mereka sebut digunakan oleh para kafir, sudah menjadi target utama ledakan bom. Karena itu, tak terhindarkan setiap orang, apapun latar belakangnya, berpeluang menjadi korban radikalisme. Penyebaran dan peledakan bom di berbagai tempat publik mengacaukan keamanan dan sekaligus dapat menelan sebanyak mungkin korban manusia. Rasa keamanan warga menjadi sulit terwujud. Ini sebagai bukti, eksistensi teroris masih tetap masif di republik ini. Akankah realitas ketidakamanan warga di negara yang demokrasi, pluralis, kebangsaan, ramah, toleran dan menyepakati landasan Bhinneka Tunggal Ika ini terus eksis? Jika realitas itu terjadi, negara telah gagal melindungi segenap warga negara. Eksistensi negara antara ada dan tiada. Negara kebangsaan bisa terancam. Rasa curiga antar warga pun semakin meningkat. Efek lanjutannya, mendorong tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi keamanan negara. Legitimasi pemerintah, cepat atau lambat, digerogeti secara sistemik sebagai dampak aksi teroris. Pada titik tertentu, kepercayaan rakyat terhadap pemangku kekuasaan negara semakin memudar, sebagai proses pembusukan rasa kebangsaan. Diperburuk lagi dengan semaraknya pejabat publik melakukan korupsi menggerogoti keuangan negara. Hal itu menjadi pendorongturunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kondisi patologi sosial tersebut sangat berkontribusi tumbuhnya radikalisme di negeri ini sebagai produk dari interaksi sosial melalui proses komunikasi antar partisipan yang dapat membetuk realitas sosial baru yang menolak negara kebangsaan.

MANUSIA PUSAT REALITAS

Proses sosial menunjukkan, termasuk konstruksi negara kebangsaan, manusia menjadi pusat dari realitas sosial. Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada Zaman Renaissance, sebagai era manusia kembali pada tradisi Yunani, yang memberikan otonomi pada rasio memahami kehidupan. Manusia tidak lagi menjadi obyek pasif yang hanya dipahami dan dihayati, namun mempunyai kompetensi dan kemandirian bereksistensi secara aktif. Manusia sebagai penentu sentral dan sekaligus sebagai pusat dari realitas. Sebagai era subyektivitas yang telah mendorong gerakan humanisme, suatu gerakan yang melepaskan diri dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan ini mengajarkan, manusia pada prinsipnya adalah

bebas dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya (Abidin, 2002:26).

Analisis terhadap manusia sebagai pusat realitas, membuat para ilmuwan mengkaji manusia dari berbagai perspektif. Diantara perspektif yang muncul berkaitan dengan obyek manusia adalah mengungkap nilai dan makna dari manusia tersebut. Paradigma ini melahirkan telaah kualitatif. Salah satu upaya yang dilakukan para ilmuwan memahami secara kualitatif terhadap manusia adalah pendekatan fenomenologi, salah satu pelopornya adalah Edmund Husserl. Husserl (dalam Abidin, 2002:141) berpandangan, manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang berkesadaran dan berkat aktivitas-aktivitas kesadarannya manusia mampu mengatasi dirinya dan menciptakan dunianya yang khas bagi dirinya. Jadi, suatu teritorial geografis tertentu bisa saja berbentuk nega kebangsaan atau di luar negara kebangsaan. Misalnya, adanya usaha pembentukan NII. Sebab, kesadaran manusia selalu terkait dengan suatu yang disadari. Kesadaran mengandung unsur ada suatu subyek, subyek terbuka untuk obyek, dan obyek itu ada. Karena itu, kesadaran menjadi intensionalitas.

Hamersma (1983:117) mengemukakan hasil pemikiran Husserl tentang kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Salah satu yang muncul sebagai hasil fenomenologi Husserl ialah perhatian baru untuk intensionalitas kesadaran. Kesadaran kita tidak dapat dibayangkan tanpa suatu yang disadari. Supaya ada kesadaran memang diandaikan tiga hal, yaitu bahwa ada suatu subyek, bahwa subyek ini terbuka untuk obyek-obyek, dan bahwa ada obyek-obyek. Fakta bahwa kesadaran selalu terarah kepada obyek-obyek, disebut "intensionalitas", dari bahasa Latin *intendere*: "menuju ke". Kiranya tidak tepat mengatakan bahwa kesadaran "mempunyai intensionalitas". Kesadaran itu justru intensionalitas. Entah kita sungguh-sungguh melihat suatu pemandangan, entah hanya mengira melihat pemandangan itu, bila kita masih tetap menyadari perbedaan antara kedua kemungkinan ini maka kita tetap menyadari "sesuatu".

Untuk mengungkap tentang kesadaran manusia adalah dengan pendekatan fenomenologi. Analisis fenomenologis, menurut Mulyana (2001:63), adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia "sebenarnya" dalam bentuk yang mereka alami sendiri. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan

melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. Itu semua untuk mengkonstruksi lingkungan sosial yang mereka kehendaki bersama seperti membentuk negara kebangsaan atau kontra negara kebangsaan. Oleh karena itu, manusia memiliki konsep diri memandang dunia di sekitarnya sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan kesadarannya. Dengan kesadarannya, manusia mampu mengelola tindakannya, sehingga tidak begitu saja menerima stimuli yang datang dari lingkungannya.

Terkait dengan kesadaran yang dimiliki oleh manusia, Dewey, sebagaimana ditulis kembali oleh Veeger (1993:221), mengemukakan, pikiran manusia bukanlah sebagai fotocopy dunia luar, melainkan sebagai hasil tindakan manusia sendiri. Manusia selalu terlibat aktif dalam proses pengenalan. Ia mendapatkan kesadarannya pada hal-hal yang ada di luar dirinya. Dalam proses aktif ini pikiran manusia tidak hanya berperan menjadi "instrument" atau sarana untuk dapat bertindak, tetapi menjadi bagian dari sikap kelakuan manusia. Teori pengenalan ini menghasilkan suatu citra manusia yang dinamis, antideterministik, dan penuh optimisme. Manusia tidak secara prinsipil menerima begitu saja pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan dan kelakuannya. Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir dia, tetapi merupakan kondisi-kondisi terhadap hal yang berkaitan dengannya dalam menentukan sikap. Gambaran manusia ini mengandaikan kepercayaan akan kemampuan manusia, yang mendasari optimisme. Oleh karena itu, aktor sosial, termasuk para politik, sebagai individu mampu berpikir dengan kesadarannya secara bebas berdasarkan konsep dirinya. Mereka tidak hanya sekedar mau menerima apa adanya pendapat-pendapat yang berasal dari lingkungan di mana mereka berada, tetapi juga mampu memberi kritik sesuai dengan sikap yang diambil berdasarkan pertimbangan kesadaran murni yang penuh. Hal tersebut sejalan dengan yang ditegaskan Schutz (dalam Mulyana, 2001:62) bahwa para aktor sosial menafsirkan sifat realitas yang relevan dengan kepentingan mereka.

IDEOLOGI KONSTRUKSI KOMUNIKASI

Radikalisme merupakan tindakan politik. Sebagai tindakan politik, radikalisme mempunyai agenda ideologi tertentu. Jadi, ada usaha menggantikan ideologi yang sudah "mapan" dengan ideologi "baru".

Ideologi kebangsaan, misalnya, melalui radikalisme berganti menjadi ideologi baru, seperti ideologi ke-agama-an. Ideologi baru ini membawa seperangkat sistem ketatanegaraan yang berbeda dari ideologi yang sebelumnya. Sistem kekuasaan dan pemerintahan berubah. Pemegang kekuasaan pun pasti “pendatang baru”.

Dalam suatu sistem sosial, termasuk sistem kenegaraan, selalu memiliki suatu ideologi. Dengan kata lain, suatu sistem sosial mempunyai ideologi yang disepakati melalui interaksi komunikasi sosial yang sangat panjang. Ideologi sebagai produk kesepakatan sosial dapat ditelusuri melalui awal lahirnya istilah ideologi. Istilah “ideologi” dipopulerkan filosof Perancis, Antoine Destutt de Tracy (1796), pada masa revolusi Perancis. Artinya, “ilmu tentang ide-ide” yang mengkaji tentang asal usul, evolusi, dan hakekat ide (Reo M. Cristenson dkk 1971, 3-4; John B. Thompson 2004, 51; Jorge Larrain 1996, 7).

Definisi ideologi dikemukakan oleh banyak pakar dari berbagai perspektif mereka. Raymond Williams sebagaimana dikutip James Lull (Alih Bahasa, Abadi, 1998; 3) mengemukakan ideologi sebagai “himpunan ide-ide yang muncul dari seperangkat kepentingan material tertentu atau, secara lebih luas, dari sebuah kelas atau kelompok tertentu”. Reo M. Cristenson dkk (1971; 5) mendefinisikan *ideology is a belief system that explains and justifies a preferred political order for society, either existing or proposed, and offers a strategy (processes, institutional arrangements, program) for its attainment.*

Sedangkan menurut Magnis-Susena sebagaimana dikutip Alex Sobur (2001;62) ideologi dianggap sebagai sistem berpikir yang sudah terkena distorsi, entah disadari, entah tidak. Biasanya “ideologi” sekaligus dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya secara tidak wajar. James Lull (Alih Bahasa Abadi, 1998;1-2) mengatakan, dalam pengertian yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, ideologi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem nilai yang terbentuk melalui interaksi sosial yang dapat merupakan sistem kepercayaan sebagai landasan bagi anggota sistem sosial (individu atau kelompok) melakukan suatu tindakan

sosial dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, ideologi sebagai suatu kesepakatan sosial dan menjadi perekat suatu sistem sosial. Namun dalam tataran implementasi ideologi, terdapat dua pendekatan yang saling berbeda.

Alex Sobur (2001;61) menyimpulkan pendapat Jorge Larrain, istilah ideologi mempunyai dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu membela dan memajukan kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Artinya, bisa terjadi ideologi yang satu menjadi kontra ideologi lain.

Selanjutnya, masih menurut John B. Thompson (2004;19), konsep ideologi dapat digunakan untuk merujuk cara-cara bagaimana makna digunakan, dalam hal tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan yang secara sistematis bersifat asimetris – yang kemudian ia sebut 'relasi dominasi. Ideologi, secara luas dinyatakan, adalah makna yang digunakan untuk kekuasaan. Karena itu, studi ideologi masyarakat menginvestigasi cara-cara bagaimana makna dikonstruksi dan disampaikan melalui bentuk-bentuk symbol dalam jenisnya yang bervariasi, dari ungkapan bahasa sehari-hari hingga citra dan teks yang kompleks; ia mensyaratkan kita untuk menginvestigasi konteks sosial tempat diterapkan dan disebarkannya bentuk-bentuk symbol; dan ia menuntut kita mempertanyakan apakah, demikian juga bagaimana, makna yang dimobilisir bentuk-bentuk symbol digunakan, dalam konteks tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi.

Lebih lanjut John B. Thompson (2004; 51) mengemukakan, ideologi adalah sebuah sistem representasi yang berusaha mempertahankan keberadaan relasi kelas dominant melalui individu yang selalu berorientasi pada masa lalunya daripada masa depan, atau pada citra dan ide yang menyembunyikan relasi kelas dan berusaha mengelak dari kejaran kolektif perubahan sosial. Oleh karena itu, ideologi menurut John B. Thompson (2004; 90), sangat memperhatikan cara-cara bagaimana bentuk-bentuk symbol saling-menyilang dengan relasi kekuasaan. Memperhatikan cara ketika makna dikerahkan dalam dunia sosial dan diarahkan untuk mendukung individu atau kelompok yang menduduki posisi kekuasaan. Jika focus ini

didefinisikan secara lebih tajam: mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara bagaimana makna diarahkan untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi.

Dengan demikian, ideologi sebagai produk proses sosial dengan menggunakan komunikasi menciptakan makna tertentu pada seperangkat simbol yang disepakati sebagai ideologi sekelompok sosial tertentu, atau suatu negara. Dengan demikian, ideologi suatu negara dapat berupa kenegaraan atau doktrin keagamaan tertentu. Realitas tersebut menunjukkan bahwa ideologi sangat cair dan dapat berubah dan bahkan berganti. Hubungan saling pengaruh antar ideologi menjadi hal yang wajar dari perspektif komunikasi. Lihat saja saling pengaruh antara ideologi demokrasi dengan komunisme. Atau atas dasar ajaran keagamaan tertentu.

KEBANGSAAN PRODUK KOMUNIKASI

Negara Kebangsaan sebagai produk interaksi melalui komunikasi antar aktor sosial. Dari perspektif subyektif, semua manusia adalah aktor sosial. Manusia yang terlibat dalam proses komunikasi dipandang sebagai partisipan bukan komunikator dan komunikan. Sebab, setiap manusia mempunyai kehendak bebas, cita-cita, perasaan, kreatif dan sebagainya. Karena itu, aktor merupakan konsep sentral dalam kajian ilmu sosial. Ritzer (2003:506) mengemukakan batasan tentang konsep aktor, bahwa konsep agen atau aktor pada umumnya merujuk kepada tingkat mikro, atau aktor manusia individual, konsep ini pun dapat merujuk kepada kolektivitas aktor yang bertindak. Jadi, aktor dapat berupa individu, organisasi, kelas sosial tertentu, atau bangsa.

Pada karya lainnya Ritzer (2005:1) menjelaskan, bahwa aktor adalah manusia yang melakukan tindakan sosial yang bertujuan menanamkan secara simbolis “sesuatu”, “identitas”, hubungan, dan penyajian kemampuan sekumpulan jaringan di dalam bermacam-macam jaringan yang lain kepada manusia lain. Kemudian Ritzer (2005:2) menguraikan, tindakan sosial terjadi ketika adanya intervensi pikiran diantara suatu stimulus, seorang aktor dan respon mereka selanjutnya. Stimulus merupakan simbol yang ditangkap oleh aktor dari luar dirinya. Blumer (Sukidin, 2002) pun menegaskan bahwa individu merupakan aktor, bukan reaktor. Reaktor memandang perilaku manusia sebagai reaksi dari stimuli yang diterimanya.

Dengan demikian, tindakan manusia merupakan tindakan yang disengaja dan bermakna dalam hubungannya dengan manusia lain. Terkait dengan itu, Weber (dalam Mulyana, 2001:61) mengatakan, tindakan sosial merupakan perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan sosial merupakan perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan di sini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. Tindakan bermakna sosial sejauh, berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau kumpulan individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya.

Sehubungan dengan itu, negara kebangsaan pun menjadi produk interaksi melalui tindakan komunikasi antar partisipan komunikasi.

MENGGELORAKAN KEBANGSAAN

Oleh karena ideologi sebagai realitas yang cair, melestarikan ideologi yang sudah eksis – Pancasila, NKR dan kebangsaan - perlu digelorakan melalui strategi komunikasi politik agar tidak ada kesempatan sedetik dan sejengkal wilayah Indonesia dijadikan tempat tindakan radikal yang mengusik keamanan warga yang tujuan akhirnya adalah mematahkan Indonesia sebagai Negara kebangsaan. Untuk itu, diperlukan gerakan semesta dengan menyatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia menghadapi berbagai aksi radikalisme dalam bentuk dan motif apapun.

Untuk mencegah, menyangkal dan menghentikan kesemenaan teroris sangat perlu digelorakan rasa kebangsaan dengan gerakan semesta mengubah radikalisme menjadi de-radikalisme (pluralisme-kebersamaan). Semua kekuatan bangsa dioptimalisasi membatasi ruang gerak perilaku anarkis baik yang “dibungkus” seolah-olah menegakkan kebenaran. Karena itu, tidak ada pilihan bagi bangsa ini, kecuali merapatkan barisan dan bergandengan tangan dengan satu bahasa dan tindakan dengan mengutuk serta menolak teroris. Jadi, jangan sampai ada perbedaan pandangan memberi ruang bagi gerakan radikal di bumi pertiwi ini. Ketika teroris melakukan bom bunuh diri di suatu rumah ibadah agama tertentu, misalnya, sangat

kurang elok jika ada tokoh masyarakat, terutama elit politik, merespon dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut sebagai usaha memecah belah antar umat dari suatu agama tertentu.

Pandangan semacam itu, dari perspektif hermeneutik, mengandung makna seolah tidak memberikan dukungan penuh menghentikan aksi teroris apapun motifnya. Namun beda maknanya jika para elit mengatakan, teroris harus ditolak, dikutuk, dihadapi dan dihentikan, apapun motif dengan kekuatan semesta bangsa. Sembari memberikan dukungan (baik moral dan informasi) secara penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian kita, menyingkap dan menghentikan semua aksi teroris. Pandangan kedua ini lebih tegas menolak radikalisme dalam bentuk dan motif apapun. Karena itu, menghentikan tindakan teroris, perbedaan pandangan politik, nilai dan kepentingan sesaat dan sempit mutlak harus dikesampingkan. Sekaligus menyatukan pikiran dan gerakan menolak berbagai manuver politik yang biasanya dilakukan secara laten. Ruang dan gerak teroris dapat diminimalisasi. Akhirnya dapat dihentikan.

Sehubungan dengan itu, kekuatan bangsa harus bersatu padu menawarkan ideologi, ajaran dan tindakan teroris, baik yang dilakukan perorangan, organisasi kemasyarakatan tertentu, maupun gerakan bawah tanah. Sehingga, secara natural rakyat mempunyai kemandirian menolak radikalisme dan tindakan cuci otak yang masif terjadi saat ini. Pada konstruksi sosial semacam itu, teroris hengkang karena frustrasi. Untuk menjangkarkan hal tersebut bagi segenap warga Indonesia, gerakan semesta harus dimulai dari unit sosial yang paling mikro, seperti keluarga, RT, kelompok kecil diskusi ke-agamaan hingga organisasi sosial yang lebih makro, seperti lembaga pertahanan keamanan negara. Namun yang berada di garda paling depan tetap pemangku kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiganya harus sejalan dan sinergi. Tidak saling berseberangan dan menyalahkan menghadapi teroris.

Peran legislatif tidak hanya membuat regulasi, tetapi jauh lebih baik memberikan dukungan politik penuh kepada aparat keamanan menangani teroris. Eksekutif di bawah koordinasi presiden melakukan deteksi dini, bertindak tegas dan cepat agar teroris tidak sempat melakukan aksinya. Meminimalkan atau kalau boleh tidak menimbulkan korban manusia. Sedangkan yudikatif memberikan sanksi efek jera bagi pelaku teroris yang dapat menjadi rujukan yurisprudensi keputusan pengadilan berikutnya. Karena itu, gerakan

semesta tidak sebatas slogan. Namun, menjadi kekuatan real, tumbuh dan berkembang pada setiap denyut kehidupan sosial. Untuk merealisasikan hal tersebut, menjadi sangat urgen menyusun dan melakukan strategi komunikasi berkelanjutan membangun realitas sosial untuk mengkonstruksi makna dan kesadaran bagi seluruh warga tentang antara lain, bahwa Negara Indonesia adalah negara kebangsaan bukan negara agama. Selain itu, membentuk peta kognisi pada setiap warga bahwa Negara Kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila dipastikan sejalan dengan ajaran agama apapun yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tindakan saling mengkafirkan, apalagi mengkafirkan orang tua sendiri tidak terjadi lagi. Yakinlah.

SUBURNYA KONTRA KEBANGSAAN

Sebagaimana uraian di atas, negara kebangsaan sebagai produk sosial, maka suburnya kontra kebangsaan juga sebagai hasil dari interaksi sosial karena negara tidak mampu mengurus negara kebangsaan, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam suatu negara. Atau disebut sebagai patologi sosial.

Di Indonesia, patologi sosial, yang mendorong suburnya kontra kebangsaan, sudah sangat kronis. Negara ini sedang dirundung berbagai masalah. Cilakanya, patologi sosial tersebut justru tumbuh dan berkembang pada lembaga-lembaga negara, yang seharusnya berfungsi menjaga, merawat dan mengobati patologi sosial tersebut. Sejumlah patologi sosial di Indonesia saat ini sedang berlangsung. Para elit politik di partai, misalnya, menjadi bagian dari patologi sosial. Partai dan elit politik belum berfungsi maksimal sebagai solusi bagi Indonesia.

Kenyataan menunjukkan, banyak elit politik menjadi virus bagi republik ini. Kalau lah kita sebagai anak bangsa melihat dengan mata hati tak akan tega menyaksikan perjalanan kehidupan bangsa kita yang masih tetap dari derita ke derita. Ibu Pertiwi tampak menangis tersendu-sendu meneteskan air mata menahan rasa sakit. Negeri ini sudah ibarat orang sakit kronis. Jangankan berjalan, berdiripun sudah tak mampu. Seakan bangsa ini berbaring di bale-bale anyaman bambu lapuk sebagai simbol ketakberdayaan fisik dan ketidakmampuan ekonomi menyembuhkan penyakit dari berbagai "virus"

korupsi. Padahal, bangsa ini dikaruniai Tuhan dengan melimpah sumberdaya alam.

Virus korupsi telah menyebar ke semua sendi kehidupan sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. Buktinya, begitu masifnya penyimpangan terjadi pada semua lembaga negara. Fakta menunjukkan, korupsi tidak hanya terjadi pada rana eksekutif sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana program kesejahteraan rakyat, tetapi aparat lembaga penegak hukum yang seharusnya berfungsi sebagai "juri" malah turut korupsi, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan hakim di pengadilan sekalipun memutuskan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Sangat ironis. Karena itu, tidak asing lagi di negeri seribu pulau ini aparat hukum bisa "dibeli". Seakan tak mau kalah, anggota DPR yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan kepada penegak hukum, juga ikut serta "menggelorakan" korupsi keuangan negara. Ditambah lagi tekukannya dugaan mafia anggaran di DPR. Bahkan sederetan anggota DPR (sudah tak sedikit) diduga atau terlibat tindak pidana korupsi. Cilakanya, para pelakunya berasal dari beberapa partai besar. Bahkan ada politisi dari Partai Demokrat (PD) sebagai partai pemenang pemilu dan pemerintah, yang sudah menduduki jabatan publik di eksekutif dan legislatif ikut serta terlibat dugaan atau tindak pidana korupsi.

Kenyataan ini menunjukkan, partai dan anggota DPR menjadi bagian sumber masalah korupsi bangsa ini. Padahal, seharusnya partai menjadi solusi dari karut maruknya penanganan korupsi di Indonesia. Kehadiran partai sangat dibutuhkan melakukan pengawasan agar republik ini terhindar dari ancaman kebangkrutan sebagai akibat keganasan kolaborasi aparat birokrasi dengan politisi koruptif melakukan "pencurian" uang rakyat. Oleh karena itu, tidak heran kehidupan politisi koruptif sangat mewah. Buktinya, bandingkan kekayaan materi dan gaya hidup para elit politik sebelum, sedang dan sesudah menduduki jabatan publik. Seringkali menjadi pertanyaan publik, bukankah gaya hidup dan kekayaan mereka jauh lebih mewah dari gaji dan penghasilan resmi? Dari mana kemewahan itu diperoleh? Atau bisa saja belum terbongkar karena garda kekuasaan melindungi mereka. Namun melihat realitas politik pragmatis yang diperankan oleh para aktor politik dan partai yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dapat memunculkan keraguan dan pertanyaan, sudahkah partai menjadi solusi penuntasan korupsi bagi negeri ini?

Jawabnya masih belum. Padahal, sesungguhnya partai pasti dapat menjadi bagian dari solusi pemberantasan korupsi, sepanjang ada ideliasme, kemauan politik semua aktor politik dan partai membersihkan diri dari praktek korupsi serta menghindari perilaku politik transaksional yang pragmatis. Utamanya harus dimotori partai yang sedang berkuasa. Sayangnya, justru ada kader partai pemenang pemilu terlibat dugaan dan atau korupsi. Ketika masuk ke zaman kemerdekaan, bangsa ini menaruh harapan besar terjadi perbaikan kehidupan rakyat. Namun, gejolak sosial dan politik silih berganti memperebutkan kursi kekuasaan. Persaingan politik antar partai semakin terbuka. Seperti terjadi perang "saudara". Agenda kesejahteraan rakyat tertinggal. Partai menjadi alat dan kendaraan meraih kekuasaan bagi para aktor politik. Tak terhindarkan partai menjadi bagian dari masalah bangsa ini. Gejolak politik semakin memanas, puncaknya yang dikenal sebagai "Gerakan, 30 September" yang melibatkan kekuatan politik masyarakat dan militer. Disengaja atau tidak, konflik politik yang sangat genting tersebut sangat kondusif melahirkan pemimpin dari kekuatan militer. Pada saat itu muncul pemerintahan rezim orde baru (Orba) di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Ia memobilisasi kekuatan militer meredam gejolak politik selama rezim Orba berlangsung. Pelanggaran hak azasi terjadi.

Dalam perjalanan rezim Orba, praktek kekuasaan semakin menguat. Demokrasi dipasung. Pemilu sebagai "topeng" demokrasi. Otoritarian mewarnai semua kebijakan politik dan pemerintahan. Partai menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintahan otoriter. Semua partai "milik" pemerintah. Pada saat itu, DPR menjadi "stempel" pemerintah. Partai pun menjadi bagian dari masalah negeri kita. Pada rezim Orba ini, sistem pemerintahan mendorong kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada berbagai aspek kehidupan sosial untuk kepentingan orang yang ada pada lingkaran kekuasaan. Akibatnya, KKN melahirkan sekelompok kecil warga negara yang menikmati kemewahan di tengah kemelaratan puluhan juta rakyat Indonesia. Partai tidak memiliki kuasa melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Harapan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sirna. Pada rezim Orba, perilaku KKN semakin menggurita. Karena itu, gerakan penolakan terhadap Orba semakin masif. Kekuatan rakyat muncul diberbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia dengan agenda menurunkan kekuasaan dengan membawa isu perubahan melalui reformasi total terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Rezim otoritarian pun runtuh.

Reformasi memberikan angin segar mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini tertindas baik secara politik maupun ekonomi. Namun apa daya, sepuluh tahun lebih reformasi, masih lebih dari 30 juta penduduk Indonesia miskin. Kebutuhan pangan pun belum terpenuhi. Jutaan rakyat sakit karena kekurangan gizi dan sangat rendahnya standart fasilitas kehidupan. Sepertinya derita rakyat tanpa akhir. Penderitaan rakyat tersebut sangat ironi di tengah kemewahan para politisi koruptif. Sementara partai belum melakukan tindakan tegas kepada kader yang diduga atau terlibat korupsi.

Tampaknya partai belum menjadi solusi bagi bangsa memberantas korupsi. Bahkan sebaliknya, ada kader partai (sudah banyak) menjadi bagian dari jaringan korupsi. Anehnya pimpinan partai seakan melindungi kader dengan mengemukakan azas praduga tak bersalah. Publik menjadi bertanya. Ada apa dengan pimpinan partai? Ataupun pimpinan partai sudah “terpenjara” oleh kadernya sendiri? Padahal, pimpinan partai lebih leluasa menggali, menganalisa dan menyimpulkan apakah kadernya melakukan korupsi. Melalui pendekatan fenomenologi, sandiwara politik tidak sulit membongkarnya.

Pendekatan ini mampu mengungkap hakekat sesungguhnya di balik perilaku politisi koruptif. Cepat atau lambat, suka tidak suka, patologi sosial tersebut sebagai salah satu dari “segudang” masalah di Indonesia yang dapat mendorong kondisinya lahirnya kontra negara kebangsaan di Indonesia, seperti adanya usaha para aktor politik tertentu yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia (NII).

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2001. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anton Bakker. 1984. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta .Ghalia Indonesia.
- Deddy Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Doyle Paul Johnson. 1990. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jilid II. Alih Bahasa Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- George Ritzer-Douglas J. Goddman. 2003. *Teori Sosial Modern*. Edisi Keenam. Alih Bahasa Aliman dan. Jakarta: Prenada Media.
- Gregory Pence. 2000. *A Dictionary of Common Philosophical Term*. Birmingham: McGraw-Hill.
- Harry Hamersma. 1983. *Tokoh-Tokoh Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia
- James Lull. 1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global*. Alih Bahasa, A. Setiawan Abadi. Jakarta: Obor Indonesia.
- John B. Thompson. 2004. *Kritik Ideologi Global, Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Ali bahasa Haqqul Yaqin. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Jorge Larrain. 1996. *Konsep Ideologi*. Penerjemah Ryadi Gunawan. Yogyakarta: LKPSM.
- K. Bertens. 1981. *Filsafat Barat Dalam Abad XX*, Jilid I. Jakarta: Gramedia.
- K.J. Veeger. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Ata Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Alih Bahasa Hasan Basri. Jakarta: LP3ES.
- Reo M. Cristenson, Alan S. Engel, Dan N. Jacobs, Mostafa Rejai, Herbert Waltzer. 1971. *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Roger Scruton. 1986. *Sejarah Singkat Filsafat Modern Dari Descartes Sampai Wittgensteins*. Alih Bahasa Zainal Arifin Tanjung. Jakarta: Panja Simpati.
- Tom Campbell. 1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Alih Bahasa F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisus.
- William F. O'neil. 2001. *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Alih Bahasa Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Zainal Abidin. 2002. *Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.